

## Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bone

Muh Danar Gemilang

Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin

Email: danar.gemilang@gmail.com

### Abstract

*Waste management is one of the major environmental issues and a key challenge in achieving sustainable development and a healthy environment. Population growth and changes in consumption patterns have led to an increase in both the volume and diversity of waste generated by society. This condition is also evident in Bone Regency, where the amount of waste produced is not proportional to the waste reduction efforts that have been implemented. This study aims to analyze the implementation of waste management in Bone Regency, focusing on the stages of waste sorting, collection, transportation, processing, and final disposal. This study employed a qualitative approach with a descriptive research method. Data were collected through observation, interviews, documentation, and literature review. The research was conducted at the Environmental Agency of Bone Regency, the Passippo Final Disposal Site (TPA), and the districts of Tanete Riattang, West Tanete Riattang, and East Tanete Riattang. The data were analyzed qualitatively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that waste management in Bone Regency has been implemented through the stages of waste sorting, collection, transportation, processing, and final disposal. Waste collection and transportation are routinely carried out by the Environmental Agency with the involvement of sanitation workers and community members. In the processing stage, the local government has developed waste bank programs as an effort to reduce waste volume and increase the economic value of recyclable materials. However, waste management still faces several challenges, including limited human resources, the increasing volume of waste generated by the community, and the continued reliance on a semi-open dumping system at the final disposal site. Therefore, greater community participation, stronger institutional capacity, and the development of a more sustainable waste management system are needed to improve environmental quality in Bone Regency.*

**Keywords:** *Waste Management, Environment, Environmental Agency, Bone Regency, Final Disposal Site.*

### Abstrak

Pengelolaan sampah merupakan salah satu isu lingkungan yang menjadi tantangan utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan lingkungan yang sehat. Meningkatnya jumlah penduduk serta perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan volume dan jenis sampah yang dihasilkan semakin meningkat. Kondisi tersebut juga terjadi di Kabupaten Bone, di mana jumlah sampah yang dihasilkan belum sebanding dengan upaya pengurangan sampah yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bone yang meliputi tahapan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Lokasi penelitian berada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Passippo, serta wilayah Kecamatan Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, dan Tanete Riattang Timur. Data dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bone telah dilaksanakan melalui tahapan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Pengumpulan dan pengangkutan sampah dilakukan secara rutin oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan melibatkan petugas kebersihan dan masyarakat. Pada tahap pengolahan, pemerintah telah

mengembangkan program bank sampah sebagai upaya mengurangi volume sampah dan meningkatkan nilai ekonomis sampah. Namun demikian, pengelolaan sampah masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan sumber daya manusia, tingginya volume sampah yang dihasilkan masyarakat, serta masih dominannya penggunaan sistem semi open dumping pada Tempat Pembuangan Akhir. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan, serta pengembangan sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan guna meningkatkan kualitas lingkungan di Kabupaten Bone.

**Kata kunci:** *Pengelolaan Sampah, Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Bone, Tempat Pembuangan Akhir.*

---

## PENDAHULUAN

Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pascaamandemen (selanjutnya disebut UUD 1945) menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jaminan hak asasi manusia terhadap lingkungan yang baik dan sehat dalam konstitusi di Indonesia merupakan hak asasi dari setiap manusia, diantara jaminan hak asasi manusia yang lain. Secara tersirat konsep negara kesejahteraan atau welfare state sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 33 Ayat (3) bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta Ayat (4). Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Pertambahan penduduk menuntut orang agar lebih praktis dalam pemenuhan kebutuhannya. Salah satu dampak yang muncul adalah semakin banyak volume sampah yang menimbulkan masalah tersendiri terhadap lingkungan. Sebagai contoh tempat makan yang hanya sekali pake, plastik yang susah untuk diuraikan alam dan juga sampah organik yang berupa makanan.

Permasalahan sampah telah menjadi isu global karena terjadi diberbagai tempat dengan menimbulkan dampak yang cukup bervariasi. Salah satu persoalan sampah yang

cukup fenomenal yaitu menyangkut pencemaran baik pencemaran tanah, udara dan air. Pencemaran itu terjadi akibat dari perbuatan manusia yang tidak terukur dan cenderung mengabaikan dampak negatifnya. jika pengolahan sampah tidak ditangani dengan baik akan berimbas pada menurunnya kualitas kehidupan, keindahan lingkungan, potensi terjadi banjir akan lebih besar karena tidak menutup kemungkinan sampah area tersebut akan menghalangi arus air sehingga terjadi bencana alam seperti banjir dan menurunnya kualitas kesehatan warga masyarakat yang tinggal di sekitar area polusi sampah. Menurut ahli kesehatan, polusi sampah, mengakibatkan dampak buruk terhadap kesehatan. Hal ini mengakibatkan berbagai macam penyakit bisa ditimbulkan di area polusi sampah tersebut seperti terindeksi saluran pencernaan, tifus, disentri, dll. Faktor pembawa penyakit tersebut adalah lalat dan berkembangnya nyamuk-nyamuk yang menginfeksi manusia dikarenakan sampah yang menggantung.

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah yang menggunakan sistem landfill akan menghasilkan bau busuk yang berasal dari tumpukan sampah yang mengalami proses dekomposisi secara alami sehingga menghasilkan gas ammonia, hidrogen sulfida dan metana. Gas tersebut kemudian menyebar sehingga dapat mempengaruhi kualitas udara di TPA. Kualitas udara yang buruk dapat mengganggu kesehatan lingkungan dan masyarakat disekitarnya, sehingga dapat meningkatkan penyakit

gangguan saluran pernafasan pada masyarakat di sekitar TPA.

Sampah menjadi masalah pelik di Kabupaten Bone. Pada tahun 2021, volume sampah Kabupaten Bone di 3 (tiga) Kecamatan: Kecamatan Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang Timur menghasilkan sampah sebesar 27.141,77, sementara pengurangan sampah yang dilakukan sebesar 6956,59. Hal ini tentu saja menunjukkan jumlah sampah yang besar tidak sebanding dengan pengurangan sampah yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat setempat.

Dalam pengelolaannya, pemerintah Kabupaten Bone masih mengandalkan sistem semi open dumping yang pembuangannya berpusat di TPA Passippo. Pengelolaan sampah di wilayah perkotaan dengan luas 126.35 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 145.394 jiwa dibandingkan jumlah tenaga kebersihan yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 265 orang tentu ini tidak sebanding. Data pegawai tersebut menyiratkan bahwa satu orang petugas kebersihan melayani 396 jiwa penduduk.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena masalah yang diteliti berupa data yang lebih tepatnya dijelaskan menggunakan kata-kata. Dalam hal pengumpulan data ini, penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bone, yaitu pada Dinas Lingkungan Hidup yang terletak di Jalan Macanang, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Passippo, dan Lingkungan Kecamatan Tantete Riattang. Peneliti memilih lokasi ini karena Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone merupakan pemangku kewenangan

Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bone. Penelitian ini dilakukan dengan estimasi waktu 2 (dua) bulan.

Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui teknik wawancara secara langsung, dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup. Serta data-data pendukung lainnya yang didapatkan melalui bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengelolaan sampah di ketiga kecamatan yaitu Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat dan Timur ini melibatkan berbagai proses yang kompleks dan memerlukan struktur organisasi yang efisien. Proses ini mencakup pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, hingga pengolahan dan pembuangan sampah. Setiap tahap membutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, termasuk pemerintah kecamatan, petugas kebersihan, dan masyarakat. Secara keseluruhan, meskipun Kecamatan Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat, dan Tanete Riattang Timur memiliki jumlah wilayah administrasi yang lebih sedikit dibandingkan dengan Kecamatan Dua Boccoe, mereka tetap menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengelola sampah secara administratif. Struktur organisasi yang jelas dan terkoordinasi dengan baik memainkan peran penting dalam memastikan bahwa semua proses pengelolaan sampah dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif, demi menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di Kabupaten Bone.

#### **Pemilahan Sampah**

Indikator pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bone yang pertama, yaitu pemilahan sampah. Tahap pemilahan

sampah ini sangat penting karena merupakan proses pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan atau sifat sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Pemilahan ini mencakup pemisahan sampah organik, seperti sisa makanan dan daun-daunan, dari sampah anorganik, seperti plastik, kertas, dan logam.

### **Pengumpulan Sampah**

Indikator kedua dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bone yang harus melalui Teknik pengumpulan sampah. Pengumpulan sampah merupakan proses pengambilan dan pemindahan sampah dari sumbernya, seperti rumah tangga, industri, dan tempat umum, ke tempat penampungan sementara atau tempat pengelolaan sampah terpadu. Penelitian ini sangat krusial karena menjadi jembatan antara tahap pemilahan sampah di sumbernya dan tahap pengolahan atau pembuangan akhir. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone mengatakan bahwa pengumpulan sampah di Kabupaten Bone dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi. Setiap hari, personil mereka aktif mengumpulkan sampah kurang lebih sebanyak enam ton dari tiga kecamatan yang ada. Kegiatan pengumpulan ini mencakup jalan-jalan protokol, jalan provinsi, dan juga rumah-rumah penduduk pada Kabupaten Bone. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan lingkungan dari sumbernya hingga destinasi akhirnya. Peneliti menilai bahwa pemerintah daerah menyadari pentingnya peran mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan untuk kesehatan masyarakat serta menjaga estetika wilayah. Upaya ini juga dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa Kabupaten Bone tetap bersih dan terbebas dari masalah sampah yang berlebihan. Dengan melibatkan masyarakat dalam program pengumpulan

sampah ini, mereka berharap dapat menciptakan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan bersama-sama.

### **Pengangkutan Sampah**

Indikator ketiga dalam penelitian ini yaitu dimana pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bone harus melalui tahapan pengangkutan sampah. Tahapan pengangkutan sampah ini merupakan proses penting di mana sampah diangkut dari sumbernya atau dari tempat penampungan sampah sementara, atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu, menuju tempat pemrosesan akhir. Proses pengangkutan sampah ini tidak hanya memindahkan sampah dari satu lokasi ke lokasi lainnya, tetapi juga memastikan bahwa sampah tersebut ditangani dengan cara yang aman dan efisien untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pada penelitian ini, peneliti menganalisis bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone sebagai instansi pemerintah menjalankan tahap pengangkutan sampah tersebut. Proses pengangkutan sampah ini dinilai peneliti memperlihatkan ketekunan dan kerja keras pemerintah serta petugas kebersihan dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan sehingga masyarakat mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman setiap hari.

### **Pengolahan Sampah**

Indikator selanjutnya dalam penelitian ini yaitu tahapan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah merupakan proses yang melibatkan berbagai kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah sehingga dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan serta meningkatkan nilai ekonomis dari sampah tersebut. Pengelolaan sampah yang efektif bertujuan untuk meminimalkan volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA) dan mengoptimalkan

pemanfaatan sumber daya yang terkandung dalam sampah.

Pengumpulan sampah di Kabupaten Bone melibatkan bank sampah induk Ma'bessa dan bank sampah unit Korpri. Setiap hari Jumat, pegawai Dinas Lingkungan Hidup membawa sampah dari rumah mereka yang dapat diolah kembali. Sampah yang dikumpulkan meliputi plastik, buku bekas, kardus, dan kaleng, yang semuanya memiliki nilai ekonomis setelah diolah. Sampah organik yang diolah menjadi kompos dapat digunakan untuk pertanian, sementara sampah anorganik yang didaur ulang dapat menjadi bahan baku industri. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mengoptimalkan proses pengelolaan sampah di Kabupaten Bone.

#### **Pemrosesan Akhir**

Pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bone juga harus melalui tahapan yang kelima yaitu pemrosesan akhir sampah. Tahapan pemrosesan akhir sampah ini merupakan tahap krusial dalam keseluruhan sistem pengelolaan sampah, di mana sampah dan residu yang tidak dapat didaur ulang atau diolah lebih lanjut dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Proses ini mencakup teknik dan metode yang digunakan untuk memastikan bahwa pembuangan akhir sampah tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan serta kesehatan masyarakat. Pemrosesan akhir yang efektif melibatkan penggunaan tempat pembuangan akhir (TPA) yang dikelola dengan baik, termasuk sistem pelapisan dasar yang mencegah leachate (lindian) masuk ke dalam tanah, pengelolaan gas metana yang dihasilkan dari dekomposisi sampah organik, serta pemantauan yang ketat terhadap potensi pencemaran.

#### **KESIMPULAN**

pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bone telah dilaksanakan melalui tahapan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah sesuai dengan ketentuan pengelolaan sampah yang berlaku. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone bersama masyarakat telah berupaya melaksanakan pengelolaan sampah secara berkelanjutan melalui kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah rutin, pengembangan bank sampah, serta pengolahan sampah yang memiliki nilai ekonomis.

Pada tahap pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan sampah, pemerintah daerah menunjukkan komitmen dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui keterlibatan petugas kebersihan dan masyarakat. Sementara itu, pada tahap pengolahan sampah telah dilakukan pemanfaatan sampah melalui program bank sampah dan pengolahan sampah organik maupun anorganik yang bernilai ekonomis. Adapun pada tahap pemrosesan akhir, sampah masih dikelola melalui sistem yang memerlukan peningkatan agar lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Meskipun pelaksanaan pengelolaan sampah telah berjalan cukup baik, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi, seperti tingginya volume sampah yang dihasilkan masyarakat, keterbatasan jumlah tenaga kebersihan, serta belum optimalnya sistem pengelolaan sampah yang diterapkan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan, penambahan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, serta pengembangan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan guna mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan di Kabupaten Bone.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afilaily, N. (2022). Peran Sentra Batik Tulis dalam peningkatan pendapatan keluarga perempuan pengrajin dalam perspektif Ekonomi Islam studi kasus di Batik Tulis Dermo Kecamatan Mojojoto Kota Kediri (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).
- Aji, A. W., Subekti, R., & Hermawan, S. (2022). Peran Pemerintah dalam Pencegahan Sampah Plastik (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 315-329.
- Anggraini, R. D. (2001). Transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran dana BOS dalam program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya. *Sumber*, 21(23), 21-77.
- Artiningsih, N. K. A., & Hadi, S. P. (2012). PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Sampangan & Jomblang, KotaSemarang). *Serat Acitya*, 1(2), 107.
- Badan Pusat Statistik, Kabupaten Bone 2023
- Darwati, S., & Anggraeni, F. (2012). Peran komunitas dalam pengelolaan sampah berbasis pola pilah kumpul olah terhadap reduksi sampah kota. *Jurnal Permukiman*, 7(1), 24-32.
- Djaenuri, A., & Enceng, M. S. (2012). Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah. *Sistem Pemerintahan Daerah*, 49.
- Ferdiansyah, M. E., & Arsiyah, A. (2014). Peran pemerintah dan kader masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat untuk pengolahan sampah. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 2(2), 191- 204.
- Fitri, W. Y., Wibowo, A. W., & Ariyanto, D. B. (2020). Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Daerah Utama Tujuan Wisata. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2), 105-112.
- Hanif, Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi daerah*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Huduri, A. N. A. (2018). Aspek Hukum Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. *Mimbar Keadilan*, 14(28).
- Jati, T. K. (2013). Peran Pemerintah Boyolali Dalam Pengelolaan Sampah Lingkungan Permukiman Perkotaan (Studi Kasus: Perumahan Bumi Singkil Permai). *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 1(1), 1-16.
- Kurniawan, D. A., & Santoso, A. Z. (2020). Pengelolaan Sampah di daerah Sepatan Kabupaten Tangerang. *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 31-36.
- Maolani, D. Y., & Ishak, D. (2018). Implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Dili Negara Timor Leste. *J. Kelola J. Ilmu Sos*, 1(2), 117-130.
- Muchsin, T., & Saliro, S. S. (2020). Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 5(2), 72-90.
- Mulasari, S. A., Husodo, A. H., & Muhadjir, N. (2014). Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah domestik. *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (National Public Health Journal)*, 8(8), 404-410.
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga
- Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Governance*, 1(2).
- Ramon, A., & Afriyanto, A. (2015). Karakteristik penanganan sampah rumah tangga di kota Bengkulu. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 10(1),

- 24-31.
- Rifani, D. N., & Jalaluddin, A. M. (2019). Pengelolaan Sampah Secara Bersama: Peran Pemerintah Dan Kesadaran Masyarakat. *Jurnal Paradigma (JP)*, 7(1), 45-54.
- Rohman, Muhammad, dan Sofan Amri. Manajemen Pendidikan (Analisis dan Solusi terhadap Kinerja Manajemen Kelas dan Strategi Pengajaran yang Efektif). Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya. 2012.
- Sabirin, S., Yudhanto, S. A., & Uly, S. (2019). Peranan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah No 14 Tahun 2009 (Studi kasus: Dipelantar I, Pelantar II dan Pelantar III)(Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji).
- Saoutro, W. (2016). Pengelolahan Limbah Atau Sampah Organik. Vol 2 No1 Univ Lampung: Lampung.
- Septiani, B. A., Arianie, D. M., Risman, V. F. A. A., Handayani, W., & Kawuryan, I. S. S. (2019). Pengelolaan sampah plastik di Salatiga: praktik dan tantangan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 17(1), 90-99.
- Soekanto & Soerjono, (2012:212). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Supryadi, A., & Amalia, F. (2021). Kedudukan Peraturan Menteri Ditinjau Dari Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia. *Unizar Law Review (ULR)*, 4(2)
- Suryani, A. S. (2014). Peran bank sampah dalam efektivitas pengelolaan sampah (studi kasus bank sampah Malang). *Aspirasi: Jurnal Masalah- masalah Sosial*, 5(1), 71-84.
- Suwerda, B., Hardoyo, S. R., & Kurniawan, A. (2019). Pengelolaan bank sampah berkelanjutan di wilayah perdesaan Kabupaten Bantul. *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan*, 11(1), 74-86.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Widodo, T. (2013). Studi tentang peranan unit pasar dalam pengelolaan sampah di Pasar Merdeka Kota Samarinda. *Journal Administrasi Negara*, 1(1), 1-11.
- Widodo, T., & Kadarwati, S. (2013). Higher order thinking berbasis pemecahan masalah untuk meningkatkan hasil belajar berorientasi pembentukan karakter siswa. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 5(1).
- Winahyu, D., Hartoyo, S., & Syaikat, Y. (2013). Strategi pengelolaan sampah pada tempat pembuangan akhir Bantargebang, Bekasi. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 5(2).
- Zulfikar, Z., & Rinaldi, Y. (2019). Peranan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Dalam Pengelolaan Sampah. *Syiah Kuala Law Journal*, 3(3), 445-458.